

**STRATEGI REKRUTMEN KADER
PEREMPUAN PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN
(PDI PERJUANGAN) DEWAN PIMPINAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

**DITRI ANGGODO RIFAPUTRA
NPM : 1831040223**



**PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDIAGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**STRATGEI REKRUTMEN KADER
PEREMPUAN PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN
(PDI-PERJUANGAN) DEWAN PIMPINAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Ushuluddin
dan Studi Agama

Oleh :

DITRI ANGGODO RIFAPUTRA
NPM : 1831040223

Pembimbing I : Abd. Qohar, M.Si

Pembimbing II : Gesit Yudha, M.I.P

**PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDIAGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah awal sebelum kita membahas lebih jauh alangkah baiknya kita menjelaskan ataupun mendefinisikan terlebih dahulu maksud dari pengertian maupun istilah yang terdapat didalam sub judul skripsi ini. Maka penulis merasa perlu dan harus melakukan penegasan judul terlebih dahulu karena takut akan menimbulkan kesalah pahaman maupun kesalahan dalam mengartikan maksud istilah-istilah maupun arti dalam judul penelitian ini. Adapun judul dari proposal skripsi ini adalah ***“Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung”***. Lalu penulis mendefinisikan maksud yang berkaitan dengan judul proposal yaitu:

Menurut Prawirokusumo, Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi misi suatu organisasi. Strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya.² Strategi bertujuan untuk menciptakan langkah-langkah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.³

Menurut Castetter, mengartikan rekrutmen sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan ketenagaan yang dirancang untuk memperoleh tenaga dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada.⁴

² Fred R. David, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

³ Etika sabariah, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁴ Widodo Suparno Eko, *Manajemen Pembangunan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Kader perempuan adalah orang yang telah dilatih dan disiapkan dengan berbagai keterampilan dan juga disiplin ilmu. Sehingga memiliki kemampuan diatas rata-rata orang pada umumnya.⁵ Pengertian diatas dapat dimaknai bahwa kader perempuan merupakan sumber daya manusia sebagai anggota dalam sebuah organisasi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki ketrampilan dan disiplin ilmu, dan ugaskan sebagai kader permpuan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi dalam sebuah partai.

Strategi rekrutmen kader perempuan dalam partai politik sendiri merupakan suatu rangkain kegiatan dalam mencari kader perempuan atau sumber daya manusia yang berkualitas. Sangat penting bagi sebuah organisasi (partai politik) untuk memilih atau memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara untuk mencari atau memiliki kader atau sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan cara melalui sistem rekrutmen.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah yang telah di paparkan di atas dalam penegasan judul ini, maka dari itu dilihat dari sistem pengrekrutan kader yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, ssalah satu proses yang dilakukan yaitu melibatkan oragnisasi sayap partai untuk meningkatkan politik afirmatif 30% keikut ssertaan perempuan dalam partai politik. Maka dibutuhkan dibutuhkannya proses pengrekrutan dan juga pengkaderan yang berjenjang untuk meningkatkan standar atau kualitas dari sikap berpolitik.

⁵ www.bmpan-diy.org/kader, diakses 17 Desember 2021 pukul 18.37.

B. Latar Belakang

Perempuan adalah makhluk Tuhan yang banyak memegang posisi mulia. Perannya sebagai ibu rumah tangga di keluarga sangat berpengaruh besar dalam menciptakan generasi yang tangguh. Perempuan dengan keistimewaan dan kekurangannya mempunyai karakter tersendiri dalam memimpin. Perempuan tetap dapat berkiprah untuk bangsa dan negara tanpa meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri bagi keluarganya.⁶

Perempuan pada zaman dahulu identik sekali dengan tiga siklus fungsi hidup, yaitu sumur, kasur, dan dapur.⁷ Sumur melambangkan pekerjaan perempuan untuk mencuci, sedangkan dapur melambangkan pekerjaan perempuan untuk menyediakan makanan untuk keluarga, dan kasur melambangkan pekerjaan perempuan untuk melayani suaminya. Pandangan konvensional seperti ini, lama kelamaan tergerus oleh perkembangan zaman, di mana pengaruh modernisasi dan globalisasi memberikan kesempatan pada perempuan terkait sikap dan perannya untuk bekerja di luar rumah, tidak semata-mata hanya mengurus wilayah rumah tangga atau sektor domestik saja.

Di zaman sekarang, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Mereka mengisi posisi-posisi penting seperti direktur, manajer, supervisor, dan masih banyak lagi. Dari tahun ke tahun mulai terjadi perkembangan karier bagi perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman, perempuan kini sudah lebih maju, yang tadinya hanya bekerja di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Saat ini perempuan sudah banyak yang berkiprah di ranah bisnis alias menjadi pengusaha. Dengan kemajuan peran dan jabatan perempuan sekarang ini, maka kedudukan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin bukan suatu hal yang mustahil.

⁶ Malahayati, *I'm The Boss*, (Yogyakarta: Yogya Bangkit, 2010).

⁷ Malahayati, *I'm The Boss*, (Yogyakarta: Yogya Bangkit, 2010).

Berbicara mengenai perempuan, Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri yang sekaligus menjadi perempuan pertama di Republik Indonesia yang menjabat sebagai presiden. Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, definisi, konsep, serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya selalu menempatkan perempuan dalam posisi yang termarginalkan dalam proses pembuatan keputusan. Perempuan menghadapi tantangan besar dalam meraih jabatan politik bukan hanya kendala yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan ada kendala struktural yang diciptakan oleh sistem nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan negara yang kurang memperhatikan kesetaraan gender. Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan dibangun atas dasar pandangan biner laki-laki dan perempuan.⁸

Dalam pandangan tersebut seringkali kaum laki-laki memandang kaum perempuan sebagai makhluk kelas kedua yang harus patuh pada perintahnya. Pandangan ini dilandasi oleh konsep nature yang menyatakan bahwa secara alamiah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Laki-laki dinyatakan mempunyai fisik yang kuat dan kemampuan rasional yang lebih baik daripada perempuan. Konsep ini juga menempatkan suatu pandangan bahwa faktor budaya menyebabkan adanya pembagian tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan (*division of labour*) di mana budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis dan menjadi terinstitusionalisasi, yang membentuk apa yang disebut budaya patriarki.⁹

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan dalam politik sudah ada sejak dahulu. Di Indonesia ditandai dengan perjuangan RA Kartini. Putri asal Jepara yang diakui sebagai Pahlawan Nasional itu saat masih berusia muda sudah merasakan keprihatinan terhadap kondisi kaum perempuan yang

⁸ Malahayati, *I'm The Boss*, (Yogyakarta: Yogya Bangkit, 2010).

⁹ Endang Sumiarni, *Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Wonderful Company, 2004).

terpinggirkan baik dari segi ilmu pengetahuan, peran, dan juga wawasannya. Kondisi seperti ini yang menjadi perhatian dan kegelisahan RA Kartini. Ia memberikan perhatian kepada perempuan-perempuan pribumi yang berada dalam kelas sosial yang rendah karena terjebak dalam kondisi marginalitas. Sehingga RA Kartini belajar bahasa Belanda dan mengirimkan surat kepada teman-teman korespondensinya untuk mengusahakan agar perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan.¹⁰

Peran perempuan juga mempunyai hak-hak politik sebagaimana halnya laki-laki. Perempuan berhak menduduki jabatan politik meskipun ada sebagian yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin negara. Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/9:71 yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (Q.S. At-Taubah/9:71).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan menempati posisi yang sama dengan laki-laki, masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat,

¹⁰ Endang Sumiarni, *Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Wonderful Company, 2004).

sebagaimana disebutkan ayat di atas “*sebagian menjadi penolong bagi yang lain*” mereka mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan tugas tersebut apalagi dalam upaya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang berbunyi :

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin di sempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa :

“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

Pada kelembagaan partai politikpun, *affirmatic action* dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan :

"Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan".

Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa : *"Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris"*.

Tidak cukup pada pendirian partai politik, *affirmative action* juga dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota. Mengenai pelaksanaan dan teknisnya, diserahkan aturan masing-masing partai politik. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

"Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing".

Affirmative action terhadap perempuan pada partai politik, tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan

sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa :

“Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dan secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan dalam wilayah politik, sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi di berbagai aspek kehidupan. Apalagi berkaitan dengan politik yang mengurus hajat hidup orang banyak, termasuk kaum perempuan itu sendiri. Kuota 30% keterwakilan perempuan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat lebih banyak lagi khususnya di ranah politik.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan atau keikutsertaan perempuan ini sepertinya belum diterapkan secara maksimal. Tercatat bahwa DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung dalam tingkat keterwakilan perempuannya pada sistem perekrutan anggota atau kader relatif masih rendah, dimana persentase menunjukkan bahwa masih dibawah 30% tingkat keterwakilan perempuan ataupun dalam perekrutan kader perempuan yang dilakukan oleh DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.

Masalah yang terjadi pada minimnya keterwakilan

perempuan, pada dasarnya didorong oleh upaya-upaya sistematis atau kesengajaan dari berbagai pihak. Selain itu, menurut Syafiq Hasyim, masalah perempuan dan politik di Indonesia disebabkan oleh empat isu, di antaranya: *Pertama*, keterwakilan politik perempuan yang masih rendah di ruang publik. *Kedua*, komitmen partai politik yang belum sensitif gender, sehingga kurang memberikan akses yang memadai bagi kepentingan perempuan. *Ketiga*, kendala-kendala yang terdapat dalam nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender. *Keempat*, minat dan hasrat perempuan untuk terjun dalam kancah politik yang rendah.¹¹

Sering kali ditemukan pengurus partai politik terkadang menempatkan perempuan pada urutan tertentu sehingga kemungkinan calon legislatif perempuan untuk menang sangat kecil.¹² Di samping itu, minimnya perempuan untuk berkiprah di dunia politik, baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi salah satu kemungkinan faktor penyebab keterwakilan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif semakin kecil. Minimnya keterwakilan perempuan merupakan fenomena yang telah lama terjadi di Indonesia.

Adanya kuota perempuan sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum mengharuskan partai politik minimal memiliki 30% anggota perempuan yang nantinya akan mewakili partainya, karena desakan kuota inilah akhirnya partai-partai mulai berbondong-bondong untuk melakukan rekrutmen terhadap perempuan sebagai syarat untuk mengikuti ajang demokrasi yaitu Pemilu.

Rekrutmen yang dilakukan oleh suatu partai politik adalah sebuah tahap awal dalam melahirkan seorang kader partai, karena rekrutmen politik pada dasarnya adalah seleksi atau

¹¹ Syafiq Hasyim, *Perempuan Indonesia Memimpin Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

¹² Zaenal Mukarom, "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif", dalam *Jurnal Mediator* Vol. 2, No. 9, Desember 2008, h. 6.

pengangkatan seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh partai politik guna berpartisipasi dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab melalui keikutsertaannya sebagai anggota salah satu partai politik. Partai politik juga sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Kita semua tentu mengetahui bahwa sepak terjang Partai PDI-P tidaklah mudah, sejak awal berdirinya sampai pada akhirnya dengan adanya kesatuan tekad dari para elit partainya yang ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai memperhatikan kepentingan terhadap kaum perempuan sebagai wujud kesetaraan gender dengan proses perekrutannya yang melibatkan perempuan.

Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut lagi tentang strategi rekrutmen, dan juga kaderisasi yang di lakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, guna memperkaya kajian penelitian tentang strategi rakrutmen dan proses kaderisasi partai politik. Kemudian menuangkannya dalam sebuah judul Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus atau batasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah domain tunggal atau terdiri dari beberapa domain yang

saling terkait dari situasi sosial yang ada dilapangan, dalam penentuan fokus dipenelitian akan lebih didasarkan pada tingkat informasi terbaru sesuai dengan yang ada dilapangan.¹³ Fokus atau batasan masalah bisa menjadi acuan dalam proses mendapatkan informasi secara relevan dan terstruktur dilapangan.

Fokus penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Fokus penelitian juga di maksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.¹⁴ Berdasarkan latar belakang maupun penjelasan diatas maka dapat di identifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

- a. Rekrutmen kader perempuan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) DPD Provinsi Lampung
- b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dalam memberdayakan perempuan dalam parlemen
- c. Kaderisasi berjenjang PDI-Perjuangan DPD Provinsi Lampung
- d. Pragmatisme pola kaderisasi PDI-Perjuangan DPD Provinsi Lampung

2. Sub Fokus

Dimana subfokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pola atau strategi rekrutemn kader perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*, (Jakarta: Alfabeta, 2017).

¹⁴ Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal Kualitatif*: 9 Januari 2009, h. 07.

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, melihat bagaimana hambatan-hmbatan dan juga faktor pendukung dalam pengrekrutan kader perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dalam mewujudkan kader yang profesional sehingga dapat memperkuat kelembagaan internal partai.

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan membantu peneliti dalam penelitian maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang jelas dan tegas, sesuai dengan kriteria dancara perumusan masalah yang benar. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan dalam proposal penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Rekrutmen Kader Perempuan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan juga pendukung dalam rekrutmen pengkaderan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian serta latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mendeskripsikan atau mengetahui bagaimana Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPD Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan juga faktor pendukung dalam Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPD Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan mengembangkan khasanah keilmuan dibidang ilmu politik, kesetaraan gender, dan juga tentang komunikasi politik, yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik. Dan juga hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan – masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan mengembangkan khasanah keilmuan bagi penelitian selanjutnya, dan juga bagi masyarakat khususnya (kaum perempuan) dibidang ilmu politik, kesetaraan gender, dan juga tentang komunikasi politik, yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik. Dan juga hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan – masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan dan juga mengembangkan khasanah keilmuan bagi Partai politik, dan juga diharapkan bisa berguna untuk mengevaluasi program – program yang sudah ada khususnya pada rekrutmen partai politik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan peneliti

dalam melakukan penelitian. Hal ini ditunjukkan agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu :

1. Skripsi berjudul ***“Peran Politik Perempuan Dalam Partai Kebangkitan Bangsa”***. Skripsi dari Yulita, Mahasiswa program studi S1 jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008.

Skripsi Yulita menjelaskan tentang Perempuan memiliki peluang untuk terjun di beberapa kepengurusan partai politik salah satunya perempuan juga menjadi wakil di lembaga legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keseriusan PKB dalam meningkatkan representasi politik perempuan dapat dilihat dalam nominasi caleg perempuan PKB pada pemilu 2004 dimana jumlah total caleg untuk DPR 29,7 % dengan komposisi 140. PKB juga memandang tentang perlunya meningkatkan keterlibatan perempuan dari sebuah partai politik karena sumber utama dari perekrutan anggota parlemen.¹⁵

2. Skripsi berjudul ***“Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif. Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta”***. Penelitian pertama diterbitkan pada tahun 2014, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Besty Anindya Nur Azni,

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai komparasi antar dua partai yaitu Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya dan berfokus pada perbedaan pola rekrutmen calon legislatif tahun 2014 di Daerah Istimewa

¹⁵ Skripsi Yunita, : *“Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa”*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

Yogyakarta dalam dua partai tersebut. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu Ada beberapa perbedaan pokok pola rekrutmen calon legislatif DPRD partai Gerindra dan PAN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan tersebut antara lain pada saat seleksi awal Bacaleg yang menggunakan cara yang berbeda, dimana PAN menggunakan strategi pembuatan visi misi berwujud paper dengan menurunkan platform partai, sedangkan partai Gerindra seleksi awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan tes psikologis perbedaan penggunaan media sosialisasi eksternal partai. Selain itu pada PAN hanya merekrut Bacaleg Kader partai terlebih dahulu, sedangkan Partai Gerindra merekrut baik kader maupun non kader partai. Selain berbagai perbedaan diatas, terdapat persamaan dari pola rekrutmen yang digunakan. Persamaan tersebut seperti pada aspek peraturan perundangan yang mereka jadikan acuan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁶

3. Skripsi berjudul ***“Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang”*** Penelitian ini dilakukan oleh Drs. Syamsir, M.Si Fakultas Ilmu-Ilmu Soisal Universitas Negeri

¹⁶ Besty Anindya Nur Azn, :*“Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif. Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

Padang yang diterbitkan pada Bulan November 2005.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di kota Padang, khususnya yang dilakukan oleh lima partai besar hasil pemilu legislatif 2004 yaitu : Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa proses penjurangan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada caleg. Selain itu juga implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap partai ternyata mengalami banyak kendala seperti kekurangan calon perempuan yang berkualitas, kurangnya pimpinan partai dalam melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 dan mepetnya waktu yang teralokasi bagi pimpinan partai politik dalam menjangking sebanyak mungkin calon perempuan.¹⁷

4. Skripsi berjudul ***“Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 2009”***.

¹⁷ Drs. Syamsir, M.Si. : *“Implementasi Kuota .30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang”*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2005).

Penelitian ini dilaksanakan oleh Esty Ekawati yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2012 oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam penerapan Affirmative Action baik dalam internal partai maupun pada pemilu 2009. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai proses rekrutmen calon anggota legislatif PKB dan peran dari Tim Mantap dalam proses rekrutmen pada pemilu 2009, selain itu juga membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perempuan PKB dalam partisipasi politik baik di internal maupun dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan bertipe deskriptif analitis dan pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga berasal dari situs internet, dokumen partai, dan makalah kebijakan.

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PKB menerapkan kebijakan afirmasi dalam dua hal; yaitu yang pertama, tindakan afirmasi pada internal partai yaitu memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan aturan tersebut tertuang dalam AD/RT PKB. Dan yang kedua yakni tindakan afirmasi pada pemilu 2009, dimana PKB mencalonkan 34% perempuan (134 perempuan) dalam daftar caleg tetap (DCT) PKB pada pemilu 2009 dan menempatkan satu perempuan diantara tiga nama caleg. Dalam DCT PKB tersebut, ada 9 perempuan menempati nomor urut 1 Ada 24 caleg perempuan pada nomor urut 2 dan 46 caleg perempuan di nomor 3.¹⁸

Dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang menyerupai dengan penelitian ini bahwasanya judul yang akan peneliti lakukan adalah ***“Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPD***

¹⁸ Esty Ekawati, : *“Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 2009”*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

Provinsi Lampung”. Lokasi penelitian dilakukan pada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan berfokus pada strategi rekrutmen dan juga pengkaderan perempuan. Dan penulis mencoba membandingkan dengan penemuan penulis sendiri. Jika di penelitian terdahulu belum menunjukkan metode teknis dengan indikator-indikator yang kurang jelas maka penulis akan menggunakan modul pengkaderan yang terstruktur hingga ada indikator antara metode dan hasil kaderisasi. Selain itu, penulis juga akan melihat tentang hubungan diantara rekrutmen partai politik hingga sampai pada proses manajemen kaderisasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁹ “Metodologi penelitian” berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan

¹⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

²⁰ Wandu Bachitar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997).

(*field research*). Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²² Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang relevan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan informasi atau data-data dengan melakukan pengumpulan data dan riset secara spesifik terhadap suatu objek yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan secara sistematis.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yakni, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Abdurrahmat Fathoni data primer adalah data yang langsung dikupumlkan oleh peneliti

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996).

²² Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13,no. 1 , (2017): 41.

²³ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).

dari sumber utama.²⁵ Data primer dalam studi secara langsung atau lapangan dihasilkan dari wawancara pada responden atau informan. Peneliti juga mengumpulkan berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Data primer dari penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPD Provinsi Lampung. Data primer yang peneliti maksud adalah untuk melihat bagaimana strategi rekrutmen yang diterapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPD Provinsi Lampung dalam perekrutan kader perempuan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer untuk dijadikan sumber atau sampel adalah Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung.



²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Citra, 2011).

Tabel 1.1
Data Primer

No.	Nama	Jabatan
1.	Deddy Wijaya Candra	Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPD PDIP Provinsi Lampung
2.	H Yanuar Irawan, S.E., M.M.	Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD PDI- Perjuangan Provinsi Lampung
3.	Ir. H. Sutono, M.M.	Sekretaris DPD PDIP Provinsi Lampung
4.	Aprilliati, S.H.,M.H.	Wakil Sekretaris DPD PDIP Provinsi Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada atau sudah jadi yang sudah dipublikasikan pada khalayak umum oleh instansi yang mengumpulkan dan mengembangkan data-data yang sudah ada. Data sekunder bisa disebut juga sebagai pelengkap dari data primer yang didapat dari literatur atau buku-buku maupun hasil karya yang berkaitan dengan objek dari penelitian.²⁶

²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*, (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014). h. 127.

Tabel 1.2
Data Sekunder

No.	Jenis Data	Sifat Data
1.	Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Website Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Ad / ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Soft File / Print Out
3.	Struktur Keorganisasian Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Soft File / Print Out
4.	Struktur Keorganisasian Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung	Soft File / Print Out

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Obesvasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi dengan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis tetapi yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁷

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Peneliti melakukan observasi ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung. Ketika mulai melakukan penelitian, hal yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pra riset atau turun lapangan sebelum penelitian dimulai guna untuk mendapatkan data awal dalam proses penelitian. Setelah memberikan surat pengantar kepada instansi yang dituju, baru mendapatkan izin untuk melakukan pra riset di lokasi tersebut. Peneliti memulai penelitian yang diawali dengan mendatangi peneliti berdialog dengan perangkat pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Pimpinan Daerah provinsi Lampung untuk memperoleh data yang cukup dan juga valid terhadap karya ilmiah ini sehingga data yang diperoleh dari berbagai narasumber dapat terkumpulkan dan dijadikan dalam karya ilmiah ini. Seabagai mana dapat kita lihat kembali pada tabel 5.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang hendak diteliti. Dengan harapan bahwa pedoman wawancara atau pertanyaan-pertanyaan bisa lebih dikembangkan lagi pada saat dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat bermacam-macam dokumentasi, dapat berupa buku, surat pribadi, laporan, notulen, rapat, catatan kasus, dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰

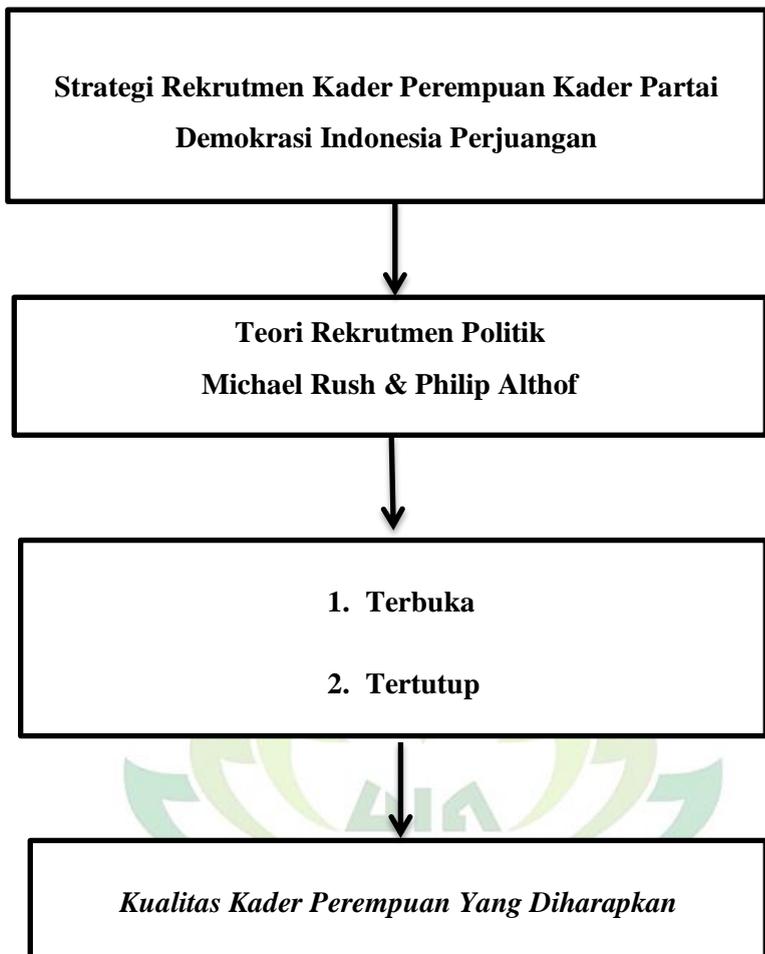


²⁸ Kondjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976).

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).

I. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian

Pola rekrutmen adalah sebuah model atau praktek rekrutmen yang dilakukan partai politik.³¹ *Michael rush dan Philip Althoff* juga mengemukakan dua pola dalam pengrekrutan politik, yaitu pola tertutup dimana pola ini adalah rekrutmen secara administratif atau patronase dan pola terbuka yaitu pola rekrutmen yang berdasarkan pada ujian berdasarkan kemampuan secara terbuka serta dalam rekrutmen terbuka oragnaisasi politik ini mempublikasikan secara luas terbuka kepada semua earga earga yang memenuhi syarat untuk memiliki kesempatan yang sama bergabung untuk menduduki posisi yang dibutuhkan.

Penelitian ini dalam mendapatkan data penulis langsung turun ke lapangan guna melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan penelitian ini. Menggunakan tehknik wawancara yang mendalan dan mendetail penulis berhasil memperoleh data dari beberapa narasumber yang sebelumnya telah penulis tentukan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi kedalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat kajian teoritis yang isinya membahas tentang Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Politik.

³¹ Philip Althoff Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Bab III, membahas objek penelitian yang memuat latar belakang dan profil serta sejarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), struktur keorganisasian, serta sayap-sayap partai yang ada di Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Bab IV, analisis data penelitian yang memuat tentang Strategi Rekrutmen Kader Perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan faktor pendukung dan juga penghambat.

Bab V, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan rekomendasi pada kajian ini sebagai bahan pertimbangan studi berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian saya tentang strategi rekrutmen kader perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung, mendapat beberapa point penting yang ditemukan. Bahwa di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melakukan rekrutmen kader perempuan mereka tidak memiliki cara khusus atau aturan khusus dalam pengrekrutan kader perempuan. Rekrutmen yang mereka lakukan sistemnya terbuka bagi semua kalangan.

Banyak strategi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung dalam perekrutan, diantaranya menampilkan *sosok figure* tokoh-tokoh atau kader-kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Lalu adanya rekrutmen melalui mulut ke mulut atau person to person, menarik keluarga, teman atau saudaranya untuk ikut bergabung. Ikut serta atau ikut andil dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Lalu PDI Perjuangan membentuk sayap-sayap partai yang gunanya untuk memfasilitasi, mewadahi, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan juga menyiapkan kader-kader yang berkualitas. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung memiliki program kaderisasi untuk para anggotanya sebagai salah satu bentuk pendidikan politik yang dimana menjadi salah satu fungsi dari keberadaan partai politik. Secara umum, pengkaderan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, bentuk pendidikan secara formal yang meliputi kaderisasi, sekolah para, dan konsolidasi. *Kedua*, bentuk pendidikan secara informal yang meliputi seminar, bedah buku, dan sarasehan politik. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung melakukan kaderisasi untuk mendapatkan kader-kader yang berkualitas berdasarkan

jenjangnya dimulai dari Kader Pratama, kemudian Kader Madya, dan tingkatan yang paling tinggi dan terakhir ialah Kader Utama.

Dalam melakukan rekrutmen kader perempuan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya memiliki beberapa kendala di dalamnya. Faktor kesulitan atau kendala dalam melakukan fungsi rekrutmen anggota baru Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung yaitu masih banyak kader-kader yang bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan alasan mencoba-coba atau hanya ikut-ikutan, dan tidak jarang juga menjadi tupai yang meloncat dari partai satu ke partai lainnya. Lalu, hambatan lain yang dirasakan dalam rekrutmen kader perempuan adalah masih ada masyarakat (kader perempuan) yang tidak mengerti atau belum paham apa gunanya berpartai. Semua ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai partai politik, apa keuntungannya dan apa konsekuensinya yang didapatkan ketika bergabung. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat ini juga berasal dari pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Yang dimana masih kurang memiliki keinginan untuk melakukan tugas pokoknya. Dari beberapa hambatan yang sudah dijelaskan di atas, dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi banyak hal dalam implikasinya. Salah satunya adalah banyak dari program-program partai sulit tercapai apabila tidak adanya jaringan. Sehingga, perlunya dibangun komunikasi yang baik dengan masyarakat umum. Sedangkan kemudahan merekrut kader perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung adalah tidak adanya dipungut biaya atau uang pendaftaran dan sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin mendaftar. Kader perempuan ini sangat didukung, dan juga diberikan ruang yang sama dengan laki-laki. Dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung sudah sangat nyata dalam mendukung kesetaraan gender yang dimana sudah menjadi keseharusan dan juga kewajiban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang dapat dipandang berguna serta menjadikan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, amanah terhadap rakyat dan bersikap adil seperti yang tertuang di dalam Pancasila sebagai idiologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri.
2. Untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diharapkan dapat menjadi lebih di tingkatkan lagi kinerja partainya, kader-kader partai juga harus bisa mempertahankan jiwa-jiwa dan tugasnya partai, agar tidak kalah saing dengan partai lainnya.
3. Semoga strategi yang telah dilakukan dan telah dilaksanakan oleh Partai Ddemokrasi Indonesia Perjuangan bisa dapat menjadi masukan dan motivasi kepada partai-partai yang lainnya yang akan mengikuti pemilihan umum ataupun dalam menjacri anggota.
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan program-programnya di lapangan dengan berkelanjutan tidak hanya menjelang pemilihan umum saja. Tetapi, diharapkan kepada partai-partai lainnya juga melakukan program-program yang berjalan setiap tahunnya dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Antonio, Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1, Jakarta: GemaInsani.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bachitar, Wandu. 1997. Metode Penelitian Dakwah, Jakarta: Logos.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafid. 2016. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafid. 2016. Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi Edisi Revisi 2016, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eko Widodo Suparno. 2015. Manajemen Pembangunan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Surakarta: Cakra Books.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Citra.
- Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Friedrich. 1967. Constitutional Government And Democracy, Weltham: Blaisdell Publishing Company.
- Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset.

- Haryanto. 2005. *Mengenal Teori-Teori Politik*, Depok: Grasindo.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Perempuan Indonesia Memimpin Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jauvani Sagala, Elia. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: t.p.
- Kansil, C. St. 1987. *Haluan Politik Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Kondjaraningrat. 1976. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Malahayati. 2010. *I'm The Boss*, Yogyakarta: Yogja Bangkit.
- Malayu Hasibuan, H.S. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchamad, Ali Safa'at. 2011. *Pembaharuan Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republ*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Neumann, Sigmund. 1963. *Modern Political Partie*, (London: The Press of Glencoe).
- Nogi Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Philip Althoff Michael Rush. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Poltak Sinambela, Lijan. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Puspoyo, Widjanarko. 2012. Dari Sukarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009, Solo: Era Adicitra Intermedia.
- R. David, Fred. 2016. Manajemen Strategik, Jakarta: Salemba Empat.
- Randall Schuler dan Susan E Jackson. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi abad 21, Jakarta: Erlangga.
- Retor A.W Kaligis. 2014. Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDIP, Tangerang: Margin Kiri.
- Rizal Pahlevi, Rizal. 2013. Analisis Efektifitas Proses Rekrutmen Dan Seleksi Dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Teknologi Riset Global Investama.
- Rush, Michael. 2007. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabariah, Etika. 2016. Manajemen Strategis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samuel P, Hunitington. 2003. Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schroder, Peter. 2008. Strategi Politik edisi revisi untuk pemilu 2009, Jakarta: Frederich-Naumann- Stiftung fuer die Freiheit.
- Simamora. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: YKPN.
- Sitepu, Anthonius. 2012. Studi Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D, Jakarta: Alfabeta.
- Sumiarni, Endang. 2004. Gender dan Feminisme, Yogyakarta: Wonderful Company.

- Surbakti, Ramlan. 1992. .Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryana. 2010. Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Susiana, Saki. 2013. Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- T. Sulistiyani, Ambar. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia: konsep, teori, dan pengembangan dalam konteks organisasi publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tjiptono, Fandi. 2000. Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi.
- Utoyo, Bambang Indra. 1994. Sistem Kaderisasi Kepemimpinan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Masa Mendatang, Departemen Pertahanan Keamanan RI: Lembaga Ketahanan Nasional.

Sumber Jurnal :

- Desi Ratnasari, "Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten MALINAU", *Ejournal Pemerintah Integratif* Vol. 1 (2013): Hal. 78.
- Hendra Sukmana dan Arsiyah, "Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo", dalam *JKMP* (ISSN. 2338-445X), No. 2, Vol. 1, September (2013): h. 158.
- Hendrawati. 2014. "Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif)", dalam *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol.18, no. 2, Oktober 2014): h.135.

Irkhamiyati, 2017. “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital”, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 13, No. 1, (2017): 41.

Mukarom, Zaena. 2008.1 “Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif”, dalam Jurnal Mediator Vol. 2, No. 9, Desember 2008, h. 6.

Pupu Saeful Rahmat, Jurnal Kualitatif: 9 Januari 2009, h. 07.

Tri Nutri Andayati, “Pengaruh Sistem Rekrutmen Dan Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Sukarela (TKS) Rumah Sakit Abdul Moloek Provinsi Lampung”, Ekonomi dan Bisnis Vol. 5, No. 1, (2018): hal.55-69.

Sumber Skripsi :

Skripsi Besty Anindya Nur Azn, :“Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif. Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

Skripsi Drs.Syamsir,M.Si, : “Implementasi Kuota .30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang”, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2005).

Skripsi Esty Ekawati, : “Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 2009”, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

Skripsi Yunita, “Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

Skripsi Suryana, “Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia., 2010).

Sumber Soft File :

Ad / ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sekretariat DPD PDI-P Provinsi Lampung Struktur Kepengurusan dan Komposisi DPD PDI-P Provinsi Lampung Masa Bakti 2019 – 2024.

Struktur Keorganisasian Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung.

Sumber Internet :

<http://annisalidramaribeth.wordpress.com/2011/02/26/kaderisasi/> diakses pada 1 Agustus 2022.

<http://jsfas.blogspot.com/2009/12/kaderisasi-kepemimpinan-proses.html> diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 17.20 WIB.

<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com/2009/04/13/kenapa-harus-ada-kaderisasi/> diakses pada 1 Agustus 2022.

Kompas, 9 Agustus 1971. Dalam Widjanarko Puspoyo. 2012. Dari Sukarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo. Era Adicitra Intermedia.

Pembaharuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun dan 2011, Tentang Partai Politik (Bandung: Citra Umbera, 2011).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1

Wikipedia, “Sejarah Partai Politik di Indonesia 2011”, <https://id.m.wikipedia.org>. diakses 1 Agustus 2022 pukul 13.37.

www.bmpan-diy.org/kader, diakses 17 Desember 2021 pukul 18.37.

Sumber Wawancara :

Hasil wawancara dengan Bapak Deddy Wijaya Candra (Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung), pada tanggal 24 Febuari 2022, pukul 13.00 WIB, di Kantor DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.

Hasil Wawancara dengan Bapak H.Yanuar Irawan, S.E., M.M (Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung), pada tanggal Senin 22 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB, di Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutono (Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung), pada tanggal Senin, 8 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB, di Kantor DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.

Hasil Wawancara dengan Ibu Apriati, S.H., M.H. (Wakil Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung), pada tanggal Senin 15 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB, di Kantor DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.

